



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

Kumpulan Berita Harian Media Online

SUBJEK

SARANA DAN PRASARANA

Jumat, 16 Juni 2023

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2023

Daftar Isi

1. HILIRISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI – *Media Online Kompas*
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BUTUH SINKRONISASI –
Media Online Media Indonesia
3. PRESIDENT JOKOWI LAUNCHES FINAL PHASE OF RPJPN 2025 – 2045 – *Media Online The Jakarta Post*

KOMPAS

Jumat

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

16 Juni 2023

Hilirisasi dan Pengembangan Industri

Yose Rizal Damuri

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Beberapa tahun setelah pembatasan ekspor produk mentah diberlakukan, produksi industri hilir mulai memperlihatkan kinerja yang menjanjikan.

Produsen produk hilir bertambah dari 21 menjadi 101 perusahaan dalam waktu enam tahun. Nilai ekspor meningkat pesat dengan pertumbuhan hampir 50 persen per tahun. Sepuluh tahun setelahnya, kita menguasai hampir 80 persen pasar produk hilir.

Cerita "sukses" ini bukanlah kisah tentang program hilirisasi yang dijalankan saat ini. Ini adalah program hilirisasi di sektor kehutanan yang dimulai akhir 1970-an dengan tujuan membangun industri hilir produk perikanan dan meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan dari hanya sekadar ekspor kayu gelondongan (*log*).

Terlepas dari kinerja gemilang ekspor dan produksi industri perikanan, ternyata program itu diperkirakan tak

meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Fitzgerald (1986) menghitung pemerintah kehilangan pendapatan 725 juta dollar AS setiap tahun, ditambah kerugian ekonomi sekitar 200 juta dollar AS, akibat rendahnya harga *log* dalam negeri dibandingkan harga internasional.

Aswicahyono (2004) juga memperlihatkan produktivitas sektor kehutanan terus menurun di periode berikutnya karena restriksi ekspor *log* menyebabkan harga bahan baku ditahan tetap rendah secara artifisial. Program ini juga memberikan tekanan cukup tinggi pada stabilitas makroekonomi sebagai akibat dari utang yang diambil dalam membangun kapasitas industri. Ini belum memperhitungkan biaya degradasi lingkungan yang terus terasa hingga waktu lama serta tumbuhnya praktik perburuan rente dalam industri tersebut.

Konsep dan tujuan hilirisasi

Belajar dari berbagai kebijakan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program hilirisasi yang kini digencarkan pemerintah.

Pertama, perlu konsep yang jelas mengenai tujuan dari hilirisasi, yaitu peningkatan nilai tambah. Nilai tambah bukan semata nilai ekspor atau nilai penjualan produk hilir. Nilai tambah adalah selisih dari nilai produksi dengan nilai material ataupun biaya untuk produksinya.

Memang, di kasus hilirisasi nikel, larangan ekspor bijih nikel berhasil menarik investasi besar untuk pengolahan lebih lanjut. Hasilnya, ekspor produk *semi-processed* seperti *ferro-nickel* meningkat pesat dari sekitar 1,4 miliar dollar AS (2018) menjadi 13 miliar dollar AS (2022).

Akan tetapi, peningkatan nilai tambah masih harus diestimasi dengan baik mengingat ekspor bijih nikel mengalami kemerosotan tajam. Diperkirakan dari hilangnya ekspor bijih nikel, Indonesia juga kehilangan nilai ekspor 5-7 miliar dollar AS. Apalagi akibat larangan ekspor, harga bijih nikel di pasar domestik berkisar 50-60 persen di bawah harga internasional.

Belajar dari kasus restriksi ekspor kakao tahun 2011, Indo-



HERUSANTO

nesia kesulitan dalam akses ke bahan baku coklat lain, seperti gula, susu, dan kacang-kacangan. Impor bahan baku besi juga meningkat untuk keperluan proses pengolahan *ferro-nickel*.

Biaya pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung tentu juga perlu diperhitungkan, seperti pembangkit listrik yang khusus dibangun untuk keperluan pengolahan. Sementara dampak positif untuk tenaga kerja pun diragukan mengingat pengolahan pertambang-

an adalah sektor padat modal.

Kedua, larangan ekspor nikel berhasil meningkatkan produksi karena keberhasilan mengundang investasi. Tingginya minat bisnis dari China untuk pembangunan infrastruktur dan konstruksi mendorong investasi pengolahan di Indonesia.

Rencana pemerintah melarang ekspor 21 komoditas mentah lain kemungkinan besar tak dapat mengundang investasi mengingat lemahnya permintaan global dan posisi Indonesia yang bukan produsen utama berbagai komoditas mentah itu.

Pemaksaan larangan ekspor hanya akan memberikan disinsentif bagi produsen hulu dan mengurangi produksi mereka. Pelarangan ekspor rotan di 2013 tak hanya menurunkan harga rotan mentah, tetapi juga kelangkaan untuk industri hilir. Ekspor rotan mentah turun, sementara ekspor produk olahan juga mengalami penurunan. Pelarangan ekspor hanya berujung pada turunnya industri itu.

Ketiga, pelarangan ekspor akan membuat produsen global mencari alternatif, terutama jika Indonesia produsen utama komoditas mentah itu dan me-

micu peningkatan harga global. Restriksi ekspor kayu mentah mendorong pengembangan *particle board* sebagai substitusi. Sejak awal 1990-an, ekspor produk kayu terutama *plywood*, terus menurun. Sementara larangan ekspor rotan semakin meningkatkan produksi *synthetic rattan*, yang lebih murah dan efisien.

Larangan ekspor nikel menyebabkan harga nikel dunia naik pesat, padahal nikel bahan baku penting produksi baterai.

Akibatnya, produsen dunia mulai mengembangkan jenis baterai lain dengan komponen selain nikel, seperti besi ataupun sulfur yang lebih murah. Ini bisa menyebabkan keinginan Indonesia menjadi *hub* utama produksi baterai jadi sulit.

Keempat, model bisnis internasional yang berkembang 40 tahun terakhir adalah pengembangan rantai pasok global. Suatu bisnis tak perlu mengembangkan seluruh rantai produksi dari suatu barang, tetapi bisa mendapatkannya dari berbagai tempat. Hanya karena suatu negara memproduksi bahan baku, bukan berarti ia bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah produk hilirnya.

Sebaliknya bisnis dari suatu negara dapat menjadi kompeti-

tif untuk memproduksi barang final tanpa harus memproduksi bahan bakunya. Meski tak memproduksi kakao, banyak negara Eropa jadi produsen besar produk coklat. Indonesia juga eksportir keempat terbesar untuk mi instan dengan pangsa 8 persen meski tak memproduksi gandum. Konsep bahwa produsen bahan baku otomatis mempunyai keuntungan untuk menjadi produsen produk final adalah konsep usang yang diragukan keberhasilannya.

Distorsi

Keinginan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja bisa dimengerti. Namun, pelarangan ekspor cenderung menyebabkan distorsi tinggi dalam perekonomian serta menumbuhkan praktik perburuan rente akibat tak berjalannya mekanisme pasar dan kurangnya transparansi, *monitoring*, dan evaluasi.

Ada banyak kebijakan alternatif dalam pengembangan industri yang bisa dijalankan. Perbaikan iklim bisnis dan investasi secara konsisten harus dipecahkan dalam rangka mendukung kegiatan atau investasi. Pemberian dukungan teknis ataupun finansial dengan skema terukur juga bisa jadi pilihan kebijakan.

Hlm: 7 - Kolom: Opini

Jumat, 16 Juni 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Butuh Sinkronisasi

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan banyak terjadi deviasi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kabupaten/kota dengan RPJM Nasional (RPJMN).

"Kenapa? Pertama adalah kalender politiknya itu berbeda. Kedua, ruang kreativitasnya itu terlalu luas dan seakan-akan kita berada dalam wilayah yang sempit, padahal ada patokan-patokan nasional yang harus dicapai, seperti sasaran bisnis Indonesia yang sedang kita susun dalam 2045. Ini, kan, milik kita semua, milik bangsa, dan kita semua harus sama-sama ke sana," ujar dia dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah, Penghargaan Khusus 2023, dan Sharing Session, yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa (13/6).

Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045 agar RPJMN, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tersinkronisasi satu sama lain sehingga kapasitas dan kemampuan yang ada dapat digunakan dengan baik. Dalam arti, akan terjadi masalah jika tidak terdapat keterbatasan sumber daya dan tidak ada sinkronisasi antara daerah dan nasional.

Misalnya, pemerintah hendak menaikkan produksi pertanian dengan komoditas padi dan berat. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah irigasi teknis tidak tersedia di bendungan.

"Ketika dibangun bendungan itu pada tempatnya, misalnya, lalu ini, kan, harus dijemput dengan pembangunan irigasi teknis yang dibawa tersier, kuarter, yang menjadi bagian dari tanggung jawab kabupaten. Ada yang menjadi bagian tanggung jawab dari provinsi, nasional di irigasi primernya, dan seterusnya. Ini, kan, kesatupaduan ini yang kita inginkan," ungkap Suharso.

Contoh lain yang diberikan ialah persoalan jalan penghubung di antara dua jalan nasional di Pulau Jawa bagian tengah ke utara dan tengah ke selatan yang dini-

lai perlu diperbaiki karena membutuhkan waktu 1-2 jam untuk melewati jalur tersebut, padahal hanya membutuhkan 10 menit jika infrastruktur jalan mulus.

Karena itu, atas perintah Presiden, pemerintah membuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah jalan untuk membantu daerah menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan problem infrastruktur jalan.

"Nah, kita bersyukur bahwa pada 2024 ini, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan bupati, wali kota, kepala daerah seluruh Indonesia itu pada tahun kalender yang sama. Karena pada tahun kalender yang sama, kita berharap ke depan RPJMN dan RPJP itu bisa *nyekrup*, bisa sinkron, dan mudah-mudahan efisiensi atas anggaran yang serbaterbatas itu kita bisa peroleh," kata Kepala Bappenas. (Ant/S-2)



MENYAMPAIKAN SAMBUTAN: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan sambutan pada Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah, Penghargaan Khusus tahun 2023 dan Sharing Session, di Jakarta, Selasa (13/6).

President Jokowi launches final phase of RPJPN 2025-2045

President Joko "Jokowi" Widodo launched at an event on Thursday the final phase of the 2025-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN), drafted by the Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency (Bappenas) to realize his Golden Indonesia 2045 vision.

The President highlighted three key points as a reference for Indonesia's development, namely state stability, sustainability/continuity and quality human capital.

"Don't win in terms of numbers but also in the aspect of human capital. This covers not only physical and skills [development], but also productivity and discipline that need complete improvement. This also requires acquiring knowledge and technology," he said.

To achieve these targets, the drafting of the RPJPN 2025-2045, which is essentially a 20-year development road map, involved all stakeholders in sharpening the development goals so Indonesia could become a developed country by 2045.

"Now I [will refer to] the Minister for National Development Planning/Head of Bappenas, he can answer more strategically and in detail. Because we are now facing tough competition with other countries, we can no longer act like in the past, using absurd terms," the President said.

Jokowi also said significant change was possible as long as "we have the courage, determination, will and hard work to make the big [leap]. This is what we need".

He added that Indonesia's demographic bonus would peak in the 2030s. "Indonesia's productive age [population] will

reach 68.3 million. This only happens once in a country's civilization," he said.

The demographic bonus could be an opportunity, but it could also be a disaster "if we are not able to manage it", the President said.

Minister for National Development Planning/Head of Bappenas Suharso Monoarfa said: "In 2045, Indonesia is expected to be a nation with a per capita income that equals that of other developed countries. Our per capita income will reach US\$30,300 or \$21,000 by 2037."

According to Suharso, Golden Indonesia 2045 also envisions an Indonesia with strong leadership and a global influence, with a poverty rate of near zero percent and a narrower income gap.

To realize this vision, the RPJPN 2025-2045 consists of eight development targets and 17 measurable development guidelines based on 45 primary development indicators.

Minister Suharso asserted that Indonesia should be able to create change in facing the global megatrend driven by technology.

"[For the] younger generation of Indonesians, the big strategy we need is a strategy that is a primary solution to spurring Indonesia's economic growth, and we must focus on particular industries. Our growth in manufacturing is expected to be higher than economic growth, so its contribution to gross domestic product [GDP] can reach 30 percent," he said.

The President's launching of the RPJPN 2025-2045 was preceded by the screening of a film that highlighted optimism for realizing Golden Indonesia 2045. The film opened with a historical clip of first president Sukarno reading out the Proclamation of Independence on Aug. 17, 1945, followed by an



Photos courtesy of Bappenas

image of Indonesia at 100 years of independence.

"Indonesia will become a nusantara [archipelagic nation] that is sovereign, developed and sustainable," the film's narrator says.

"Let's unite, rise up and grow together for a developed Indonesia," President Jokowi says in the film.

The Indonesian population is expected to reach 324 million by

2045, when it will be the world's sixth most populous country.

The film says that hard work, innovation and breakthroughs are needed to realize the dream of Golden Indonesia 2045.

"Reform measures are not enough. We have to conduct a total transformation."

It adds that downstream businesses should not focus only on mining, and that "the renewables-based downstream

industry should also be encouraged".

Industrialization also applies to skilled workers in labor-intensive industries as well as technology and innovation industries, such as aviation, defense and biotechnology.

"Industrialization will also cover food sustainability and resilience," the film says.

According to the film, since industrialization is driven by

digitalization, programming language will become a key subject in the national curriculum, "starting from the first year of elementary school".

The Golden Indonesia vision will be realized through four crucial phases, namely strengthening foundational transformation, accelerating transformation, global expansion and embodying Golden

Indonesia 2045.